

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan.

Dengan demikian, SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional). Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional (pasal 14 Permendagri 13 Tahun 2006)

Pemilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung sebagai objek penelitian dikarenakan SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi dan bertanggung jawab atas pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. SKPD Kabupaten Bandung mempunyai peran dan tanggungjawab di bidang pengelolaan keuangan karena SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB), serta dalam rangka untuk mengetahui bagaimana proses sistem akuntansi yang berada di SKPD Kab. Bandung yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kabupaten Bandung memiliki 33 SKPD yang terdiri dari

Inspektorat, Sekertariat, Dinas, Badan, dan RSUD. Berikut daftar SKPD yang terdapat di Kabupaten Bandung;

1. Sekertariat Daerah.
2. Sekertariat DPRD.
3. Inspektorat.
4. BAPPEDA.
5. BKD.
6. BKPPD.
7. BPBD.
8. Badan Kesbangpol.
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Dinas Pangan dan Perikanan.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Dinas Lingkungan Hidup.
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
18. Dinas Kesehatan.
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
22. Dinas Parawisata dan Kebudayaan.
23. Dinas Pendidikan.
24. Dinas Perhubungan.
25. Dinas Pertanian.
26. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan.
27. Dinas Kebakaran.
28. Dinas Sosial.
29. Dinas Tenaga Kerja.
30. Satuan Polisi Pamong Praja.
31. RSUD Cicalengka.
32. RSUD Majalaya.
33. RSUD Soreang.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah sistem, yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Desentralisasi tersebut merupakan sistem yang mengatur pemerintah, dimana pemerintah daerah wajib melaporkan setiap aktivitas yang terjadi pada pemerintahan pusat. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atas kegiatan yang telah dilakukan. Organisasi pemerintahan di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi pemerintahan tersebut, baik pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Contohnya pada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berupaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Pelaporan keuangan suatu entitas

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kemudian untuk mengetahui apakah LKPD tersebut berkualitas, LKPD yang disajikan, kemudian diterbitkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah diterbitkan, BPK mengeluarkan opini atas LKPD tersebut. Indikator bahwa LKPD sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap LKPD (Adhi, dkk.2013). Selanjutnya, terdapat 4 kriteria opini atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Mengeluarkan Pendapat (TMP)
4. Tidak Wajar (TW)

Dari tahun 2012 - 2015 BPK belum pernah memberikan opini WTP dalam 4 tahun terakhir atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 1

Daftar Opini Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015

| Provinsi Jawa Barat | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LKPD | | 27 | | 28 | |
| NO | ENTITAS PEMERINTAHAN | OPINI TAHUN 2012 | OPINI TAHUN 2013 | OPINI TAHUN 2014 | OPINI TAHUN 2015 |
| 1 | Provinsi Jawa Barat | 1 WTP | 1 WTP | 1 WTP | 1 WTP |
| 2 | Kab. Bandung | 1 WDP | 1 TMP | 1 WDP | 1 WDP |
| 3 | Kab. Bandung Barat | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP |
| 4 | Kab. Bekasi | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP | 1 WTP |
| 5 | Kab. Bogor | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 6 | Kab. Ciamis | 1 WDP | 1 WTP DPP | 1 WTP | 1 WTP |
| 7 | Kab. Cianjur | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP | 1 WTP |
| 8 | Kab. Cirebon | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 9 | Kab. Garut | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 10 | Kab. Indramayu | 1 WDP | 1 TMP | 1 WDP | 1 WTP |
| 11 | Kab. Karawang | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 12 | Kab. Kuningan | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP | 1 WTP |
| 13 | Kab. Majalengka | 1 WDP | 1 WTP DPP | 1 WTP | 1 WTP |
| 14 | Kab. Pangandaran | | | 1 WDP | 1 WDP |
| 15 | Kab. Purwakarta | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 16 | Kab. Subang | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 TMP |
| 17 | Kab. Sukabumi | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 18 | Kab. Sumedang | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 19 | Kab. Tasikmalaya | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 20 | Kota Bandung | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP |
| 21 | Kota Banjar | 1 WTP | 1 WTP | 1 WTP | 1 WTP |
| 22 | Kota Bekasi | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 23 | Kota bogor | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP |
| 24 | Kota Cimahi | 1 WDP | 1 WTP DPP | 1 WTP DPP | 1 WTP |
| 25 | Kota Cirebon | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP |
| 26 | Kota Depok | 1 WTP | 1 WTP | 1 WTP | 1 WTP |
| 27 | Kota Sukabumi | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WTP |
| 28 | Kota Tasikmalaya | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP | 1 WDP |

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semseter II 2016

Data di atas menunjukkan bahwa LKPD dari SKPD yang berada di Kabupaten Bandung yang tidak pernah mendapatkan Opini WTP selama tahun 2012,2013,2014, dan 2015 atau 4 tahun berturut-turut dibandingkan dengan kota-kota atau kabupaten-kabupaten lainnya yang berada di Jawa Barat. Bahkan pada tahun 2013 BPK memberikan opini TMP (Tidak Mengeluarkan Pendapat). Hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan SKPD di Kabupaten Bandung terutama dalam bidang keuangan/pelaporan keuangan masih belum maju dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain yang berada di lingkup wilayah Jawa Barat, sehingga penulis memilih untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang menjadi pengaruh terhadap kualitas LKPD yang terdapat di Kab. Bandung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat sesuai yang tertera pada tabel 1.1 membuktikan terdapat fenomena kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah yang khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan yang memberikan pendapat mengenai “Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015”. Pendapat BPK ini didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dan 2015 terhadap efektivitas upaya pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam rangka menyusun pertanggungjawaban APBN/APBD tahun 2015. Dalam pemberian pendapat BPK tersebut terdapat beberapa pokok masalah yakni :

1. Belum ada strategi komprehensif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.
2. Ketidakjelasan kebijakan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual.
3. Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.
4. Belum lengkapnya perangkat regulasi yang digunakan pemerintah dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.

5. Belum dilaksanakannya penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment/ CSA*) sebagai strategi penguatan instrumen pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut terdapat beberapa analisis pokok masalah yang terjadi pada pemerintah daerah mengenai kesiapan pemerintah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM). Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kadek Desiana Wati, dkk,(2014).

Hal yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM sangat diperlukan dalam mendukung kinerja juga diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Cornell Syarif Prawiradiningrat, beliau berpendapat “ secara umum, untuk daerah-daerah yang memiliki opini WDP kelemahannya masih menyangkut aset dan pertanggungjawaban keuangan, Namun sebenarnya hal tersebut dapat diperbaiki apabila komitmen dari Kepala Daerah serta ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat.” (sumber: *bandungekspres.co.id* 3 Juni 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2011), Dewi Andini & Yusrawati (2013), Ihsanti (2014), Nurillah (2014), dan Saleba (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lain halnya dengan penelitian yang di lakukan oleh Zuliarti (2012), dan Hazrita dkk (2013) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pemahaman regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual.

Berkaitan dengan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpendapat bahwa belum lengkapnya perangkat regulasi yang digunakan pemerintah dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual, hal tersebut adanya keterkaitan pada permasalahan pada peraturan/regulasi dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).

Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup sulit sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep akuntansi. Penerapan akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan pengguna LKPD serta upaya dalam meningkatkan kualitas dari LKPD tersebut. Pada tahun 2015 seluruh sektor pemerintahan sudah harus menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa bentuk dan isi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lalu, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1), juga mempertegas bahwa seluruh sektor pemerintahan sudah harus menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Ketika SAKD diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Drama.(2014).

Secara spesifik laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian, informasi laporan keuangan pemerintahan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana di syaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni: (i) relevan, (ii) andal, (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, dan (iv) dapat dipahami oleh pengguna. Menurut hasil penelitian dari A. Dahri (2015) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga Dwi Permadi (2013) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik, maka baik pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dibandingkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Liza,dkk.(2014), menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun, menurut penelitian Ihsanti.(2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas dari LKPD, dikarenakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan penemuan tersebut, peneliti mengangkat penerapan SAKD sebagai variabel kedua dalam penelitian ini.

Salah satu faktor penentu lainnya yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi

kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten Winidyaningrum,(2010).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Pemerintah Kabupaten Bandung memperoleh opini yakni pada tahun 2012 BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, pada tahun 2013 BPK RI memberikan opini “Tidak Memberikan Pendapat”. pada Tahun 2014 BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian”, dan pada Tahun 2015 BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” dalam menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Seperti diketahui, opini merupakan keluaran dari sebuah proses pemeriksaan laporan keuangan. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas sebuah laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah itu sendiri. Berkaitan opini yang diberikan BPK tersebut pada Pemerintah Kabupaten Bandung, dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan temuan yang terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang ditemukan antara lain, pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai ketentuan diantaranya permasalahan pencatatan berupa aset belum di catat pada neraca atau nilai aset berbeda dengan catatan pendukungnya. Maka dari permasalahan pencatatan dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan kinerja transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pasal 55 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2004 juga mengamanatkan agar Menteri/ pimpinan lembaga membuat *Statement of Responsibility* (SOR) pada penerbitan laporan keuangan untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Adanya SPIP seharusnya mempermudah dalam menjalankan rencana yang telah disusun agar dapat mencapai hasil sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya SPIP diharapkan hasil dari laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang andal dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak mengakibatkan kesalahan yang menimbulkan kerugian organisasi.

Hal ini ditunjukkan melalui hasil penelitian Nurillah,dkk.(2014), pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Namun menurut, penelitian Drama.(2014) pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan dengan beberapa fenomena yang dapat diungkapkan pada latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki beberapa permasalahan. Selain itu juga didukung melalui beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung”**.

1.3. Perumusan Masalah

Terkait perubahan regulasi penggunaan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010, maka secara tidak langsung baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2015. Dampak dari penerapan amanat PP No. 71 tahun 2010 adalah berubahnya SAKD yang digunakan pemerintah sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 74 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa adanya perubahan besar pada paket aplikasi sistem yang digunakan oleh pemerintah seperti sistem anggaran terpadu, penerapan akuntansi pemerintah, dan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi hal utama yang mendukung suatu kegiatan dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah. Maka dengan adanya perubahan regulasi, jika sumber daya manusia tidak siap mendukung baik dalam kompetensi/ kemampuan dalam sistem akuntansi mengakibatkan tidak adanya strategi komprehensif penerapan pada pelaporan keuangan berbasis akrual, ketidakjelasan dalam penyajian laporan keuangan, dan kurangnya strategi penguatan instrumen pengendalian dalam pelaporan keuangan.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi informasi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Bandung, maka penulis membuat identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kompetensi sumberdaya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.

3. Bagaimana pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.
5. Bagaimana pengaruh secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumberdaya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Bandung pada tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bandung pada tahun 2017.

1.6. Manfaat Penelitian

Setiap hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Untuk itu manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa hal :

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih mendalam berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

1.6.2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan bahan pertimbangan/saran dalam hal pengembangan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengimplementasian sistem pengendalian internal dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan dan menjadi variabel independen atau variabel X adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), sistem pengendalian intern pemerintah (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini atau variabel Y adalah kualitas laporan keuangan.

1.7.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang memiliki 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, terdiri dari sekretariat, dinas, badan, dan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), dan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk melakukan analisis terhadap ketiga variabel independen (X1, X2, dan X3).

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dengan isi di setiap babnya, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Bab ini diakhiri dengan sistematika tugas akhir yang menjelaskan secara ringkas isi masing-masing bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan dasar penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti, serta kerangka teoritis yang membahas pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan

pedoman untuk pengujian. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran teoritis, maka diajukan hipotesis penelitian yang akan diuji pada hasil dan pembahasan. Bab ini diakhiri dengan penjelasan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian meliputi uraian tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data yang diperlukan, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

Halaman Sengaja Dikosongkan